

2024



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

☎ 0622-7550426

📷 pn.simalungun

🌐 www.pn-simalungun.go.id

✉ info@pn-simalungun.go.id

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



PROFIL PIMPINAN



Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Surtiyono, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.
Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun



Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Simalungun

KATA PENGANTAR

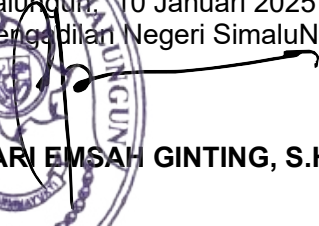
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu nammo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2023 selesai disusun. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi kinerja Pengadilan Negeri Simalungun selama tahun 2023 kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Simalungun kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2024, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Simalungun khususnya dan di Indonesia pada umumnya,serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

*Salam Sehat, Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatu,
Om santi santi om*
Pengadilan Negeri Simalungun, BERAksi !

Simalungun, 10 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

- I PROFIL PIMPINAN
- II KATA PENGANTAR
- III DAFTAR ISI
- IV DAFTAR TABEL
- V DAFTAR GAMBAR

1 PENDAHULUAN

- 10 Kebijakan Umum Peradilan
- 13 Visi dan Misi
- 14 Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Simalungun
- 15 Budaya Kerja
- 16 Motto
- 17 Rencana Strategis (Renstra)

II KEADAAN PERKARA

- 20 Keadaan Perkara
- 23 Penyelesaian Perkara
 - 23 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
 - 24 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu
 - 25 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
 - 27 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi
 - 28 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi
- 28 Capaian Prioritas Nasional
 - 28 Posbakum
 - 29 Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
 - 29 Perkara Prodeo



III SUMBER DAYA MANUSIA

- 34 Mutasi
- 36 Promosi
- 37 Pensiun
- 37 Diklat

IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 42 Pengelolaan Keuangan
- 49 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 52 Pengelolaan Teknologi Informasi
 - 56 Implementasi Ecourt
 - 57 Implementasi SIPP

V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- 59 Akreditasi Penjaminan Mutu
- 65 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 67 Inovasi Pelayanan Publik

VI PENGAWASAN

- 73 Internal
- 75 Eksternal

PENUTUP

- 78 Kesimpulan
- 78 Rekomendasi

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- 1 *Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024*
- 2 *Implementasi E-Court Tahun 2024*
- 3 *Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024*
- 4 *Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2024*
- 5 *Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2024*
- 6 *Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2024*
- 7 *Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2023 4*
- 8 *Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2024*
- 9 *Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2024*
- 10 *Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus*
- 11 *Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus*
- 12 *Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu*
- 13 *Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu*
- 14 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- 15 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*
- 16 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- 17 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*
- 18 *Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*
- 19 *Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*
- 20 *Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi*
- 21 *Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi*
- 22 *Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2023*
- 23 *SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang*
- 24 *Keadaaan SDM Berdasarkan Jabatan*
- 25 *Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat*



- 26 *Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan*
- 27 *Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2024*
- 28 *Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2024*
- 29 *Rekapitulasi Pensiun Tahun 2024*
- 30 *Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2024*
- 31 *Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2024*
- 32 *Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2024*
- 33 *Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024*
- 34 *Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024*
- 35 *Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2024*
- 36 *Keadaan Rumah Dinas TA. 2024*
- 37 *Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2024*
- 38 *Keadaan Server 2024*
- 39 *Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2024*
- 40 *Rata-rata Scor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2024*
- 41 *Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2024*
- 42 *Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat*
- 43 *Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024*

DAFTAR GAMBAR

- 1 *Misi Pengadilan Negeri Simalungun*
- 2 *Motto Pengadilan Negeri Simalungun*
- 3 *Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun*
- 4 *Keadaan SDM Berdasarkan Jabatan*
- 5 *Penerimaan PNBPN 2024*
- 6 *Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar*
- 7 *Peta E-Court Seluruh Indonesia dan Tampilan E-Court*
- 8 *Tampilan SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Simalungun*
- 9 *Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Simalungun*
- 10 *Penandatanganan Pakta Integritas dan Rapat Kepaniteraan*
- 11 *Monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum*
- 12 *WA Bot AYA (Ask Your Assistant)*
- 13 *MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 2024*
- 14 *Pelaksanaan Public Campaign tahun 2024*
- 15 *Jadwal DDTK tahun 2024*
- 16 *menerima penghargaan dari KPPN Pematangsiantar*
- 17 *Penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2024*
- 18 *Back up SIPP dan Ruang Server*
- 19 *Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER*
- 20 *Deskripsi Inovasi E-Pelita*
- 21 *Deskripsi Inovasi Syparis*
- 22 *Deskripsi Inovasi Brodi*
- 23 *Deskripsi Inovasi Pangsid*
- 24 *Deskripsi Inovasi E-Checklist*
- 25 *Deskripsi Inovasi E3P*
- 26 *Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi*
- 27 *Duta E-Court Pengadilan Negeri Simalungun*



BAB I

PENDAHULUAN



A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Saat ini lembaga peradilan dituntut untuk lebih profesional dan transparan dalam penyelesaian perkara untuk menjadikan lembaga peradilan sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena ini Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Simalungun harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi,

meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Simalungun dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Simalungun selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap prilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan

oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Program tunggakan minutes nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
3. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stop integrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola secara satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada *website* Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B “www.pn-simalungun.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;
5. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan di sekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
6. Program Standarisasi Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri;
7. Pelaksanaan penyelesaian perkara secara mediasi;
8. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan pada kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis;

Pada tahun 2024, tepatnya per tanggal 1 April 2024 Pengadilan Negeri Simalungun telah memberlakukan dan melaksanakan sidang secara *offline* yang mana kebijakan tersebut diambil sehubungan telah pulihnya keadaan Indonesia dari bencana Covid-19. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Simalungun berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama

5 bulan. Dan untuk mendukung tercapainya penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain :

1. Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Court Calender;
2. Meningkatkan kepatuhan dalam pengisian data pada SIPP;
3. Melaksanakan administrasi perkara secara eletronik melalui e-Court dan e-Litigasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui meja PTSP dengan melaksanakan Pembinaan PTSP setiap pagi pada hari kerja;

Pengadilan Negeri Simalungun juga aktif dalam melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap aspek-aspek yang mendukung kinerja dan pelayanan secara maksimal. Serta secara rutin melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Sasaran akhir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan;
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun, adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

Gambar 1. Misi Pengadilan Negeri Simalungun



C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada

Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

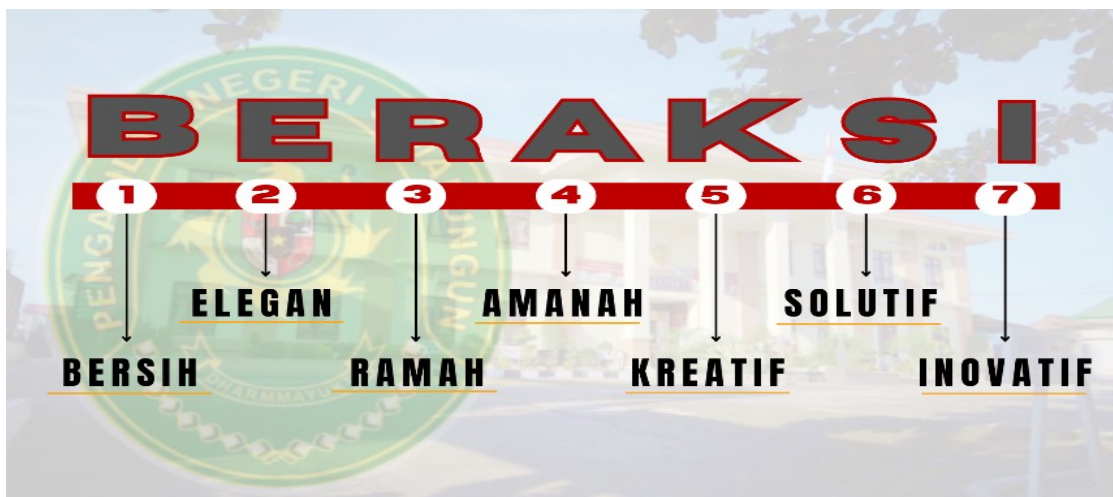
Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;
5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTO

Motto Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B adalah “**BERAKSI**” yang merupakan akronim dari “**Bersih Elegan Ramah Amanah Kreatif Solutif dan Inovatif**”.

Gambar 2. Motto Pengadilan Negeri Simalungun



F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Simalungun yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Simalungun;

7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Simalungun maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Simalungun secara akuntabel, efektif dan efisien.



BAB II

KEADAAN

PERKARA



A.KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2024

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Perdata

Tabel 1. Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Total Beban 2023	Cabut 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata Gugatan	45	176	221	23	125	73
2	Perdata Permohonan	1	248	249	52	185	12
3	Gugatan Sederhana	1	9	10	2	6	2
4	Perlawanan/Derden Verzet	3	11	14	2	6	6
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	1	7	8	-	8	-
7	Eksekusi	9	33	42	2	10	30

Statistik Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Tabel 2. Implementasi E-Court Tahun 2024

No.	Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	Pengadilan Negeri Simalungun	444	219.585.000	176	248	11	9	444
	Jumlah	444	219.585.000	176	248	11	9	444

b. Keadaan Perkara Pidana

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pidana Biasa	27	452	479	0	430	49
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	9	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	4330	4330	-	4330	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	15	16	-	16	-
7	Pidana Peradilan	-	7	7	-	7	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding Tahun 2024

a. Keadaan Perkara Perdata Banding :

Tabel 4. Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Perdata Gugatan	9	23	32	1	26	5
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan/ Derden Verzet	-	2	-	-	2	-
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksekusi	-	-	-	-	-	-

b. Keadaan Perkara Pidana Banding :

Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pidana Biasa	28	131	159	-	124	35

2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	-	-	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Tahun 2024

a. Keadaan Perkara Perdata Kasasi :

Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Perdata Gugatan	23	16	39	3	27	9
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksekusi	-	-	-	-	-	-

b. Keadaan Perkara Pidana Kasasi :

Tabel 7. Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pidana Biasa	16	99	115	0	78	37
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2024

a. Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 8. Keadaan Perkara Perdata PK Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Perdata Gugatan	4	8	12	-	9	3
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan/	-	-	-	-	-	-

	Deden Verzet						
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksekusi	-	-	-	-	-	-

b. Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali (PK) :

Tabel 9. Keadaan Perkara Pidana PK Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Total Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pidana Biasa	-	2	2	-	-	2
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-	-	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus pada tahun 2024. Berikut uraian setiap jenis perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;

a. Perkara Perdata :

Tabel 10. Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Sisa Tahun 2023 Yang Dicabut 2024	Sisa Tahun 2023 Yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024 Yang Belum Putus
1	Perdata Gugatan	45	-	45	73
2	Perdata Permohonan	1	1	1	12
3	Gugatan Sederhana	1	-	1	2
4	Perlawanan/Derden Verzet	3	0	3	6
5	PHI	-	-	-	-

6	Permohonan Konsinyasi	1	0	1	-
7	Eksekusi	9	-	6	30
Jumlah		60	1	57	123

b. Perkara Pidana :

Tabel 11. Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Sisa Tahun 2023 Yang Dicaput 2024	Sisa Tahun 2023 Yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024 Yang Belum Putus
1	Pidana Biasa	27	-	27	49
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	-	1	-
7	Pidana Peradilan	-	-	-	-
Jumlah		28	-	28	49

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai berikut :

a. Perkara Perdata :

Tabel 12. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2024	Jumlah Beban Perkara Tahun 2024	Perkara Yang Diputus Tahun 2024	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	45	176	221	148	98	50
2	Perdata Permohonan	1	248	249	237	237	0
3	Gugatan Sederhana	1	9	10	8	8	0
4	Perlawanan/ Derden Verzet	3	11	14	8	6	3
5	PHI	-	-	-	-	-	-
6	Permohonan Konsinyasi	1	7	8	8	6	1
7	Eksekusi	9	33	42	10	5	5
Jumlah		60	484	544	419	360	59

b. Perkara Pidana :

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2023	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2024	Jumlah Beban Perkara Tahun 2024	Perkara Yang Diputus Tahun 2024	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	27	452	479	430	430	-
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	9	9	9	9	-
4	Lalu Lintas	-	4330	4330	4330	4330	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	15	16	16	16	-
7	Pidana Peradilan	-	7	7	7	7	-
Jumlah		28	4813	4841	4729	4729	-

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Berikut adalah jumlah perkara Pengadilan Negeri Simalungun yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2024 :

a. Upaya Hukum Banding

i. Perkara Perdata :

Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2023 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2024 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	8	148	23	125
2	Perdata Permohonan	-	238	-	238
3	Gugatan Sederhana	-	8	-	8
4	Perlawanan/ Deden Verzet	-	8	2	6
5	PHI	-	-	-	-
Jumlah		8	402	25	377

ii. Perkara Pidana:

Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2023 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2024 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	5	430	131	304
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	9	-	9
4	Lalu Lintas	-	4330	-	4330
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	3	16	-	19
7	Pidana Praperadilan	9	4792	131	4670
	Jumlah	9	4792	131	4670

b. Upaya Hukum Kasasi

i. Perkara Perdata :

Tabel 15. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2023 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2024	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	-	26	14	12
2	Perdata Permohonan	-	-	-	-
	Jumlah	-	26	14	12

ii. Perkara Pidana:

Tabel 16. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2023 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2024	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	-	124	99	25
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
6	Pidana Anak	-	1	1	-
7	Pidana Praperadilan	-	-	-	-
	Jumlah	-	125	100	25

c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

i. Perkara Perdata :

Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2024 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2024 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2024	Permohonan PK Tahun 2024	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024
1	Perdata Gugatan	144	9	27	8	172
2	Perdata Permohonan	236	-	-	-	236
3	Gugatan Sederhana	8	-	-	-	-
4	Perlawanan/Derden Verzet	5	1	-	-	-
5	PHI	-	-	-	-	-
Jumlah		393	10	27	8	422

ii. Perkara Pidana :

Tabel 18. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No.	Jenis Perkara	Putusan Tk. I Tahun 2024 Yang Telah BHT	Putusan Banding Tahun 2024 Yang Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2024	Permohonan PK Tahun 2024	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2024
1	Pidana Biasa	430	124	78	2	76
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-	-	-
4	Lalu Lintas	4330	-	-	-	-
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	16	1	1	-	1
7	Pidana Praperadilan	7	-	-	-	-
Jumlah		4792	125	79	2	77

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil di Mediasi Tahun 2024 :

Tabel 19. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2024	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	176	2	-	-	2	-
Jumlah		176	2	-	-	2	-

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri Simalungun yang berhasil melalui diversi pada tahun 2024 :

Tabel 20. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2024	Jumlah Perkara Diversi 2024	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	15	4	3	3	-
Jumlah		15	4	3	3	-

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Tabel 21. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2024

No.	Nama Pengadilan	Organisasi Yang Memberi Pelayanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	LBH Perjuangan Keadilan	268	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	-

Jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM adalah :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma;

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling/ pelayanan terpadu sepanjang tahun 2024. Namun pada bulan 7 tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk membahas tentang diadakannya Sidang Keliling pada Pengadilan Negeri Simalungun. Sehingga telah diajukan usulan untuk mengadakan Sidang Keliling pada anggaran DIPA tahun 2024 ke Mahkamah Agung namun belum terealisasi.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 nihil karena tidak ada pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2024. Selain daripada itu tidak tersedia anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahun Anggaran 2024.

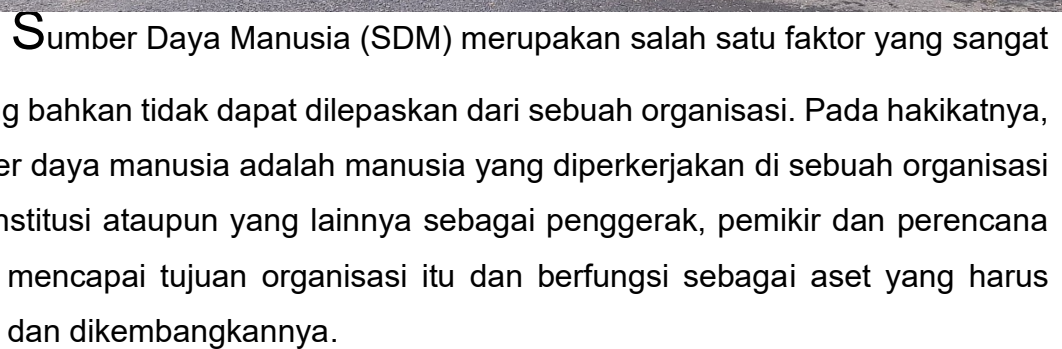
A wooden gavel with a silver band is positioned diagonally across the frame, resting on a white computer keyboard. The background is a soft-focus image of the keyboard keys, with letters like 'W', 'E', 'D', and 'A' visible. The text is overlaid in the center in a bold, orange, outlined font.

BAB III

SUMBER

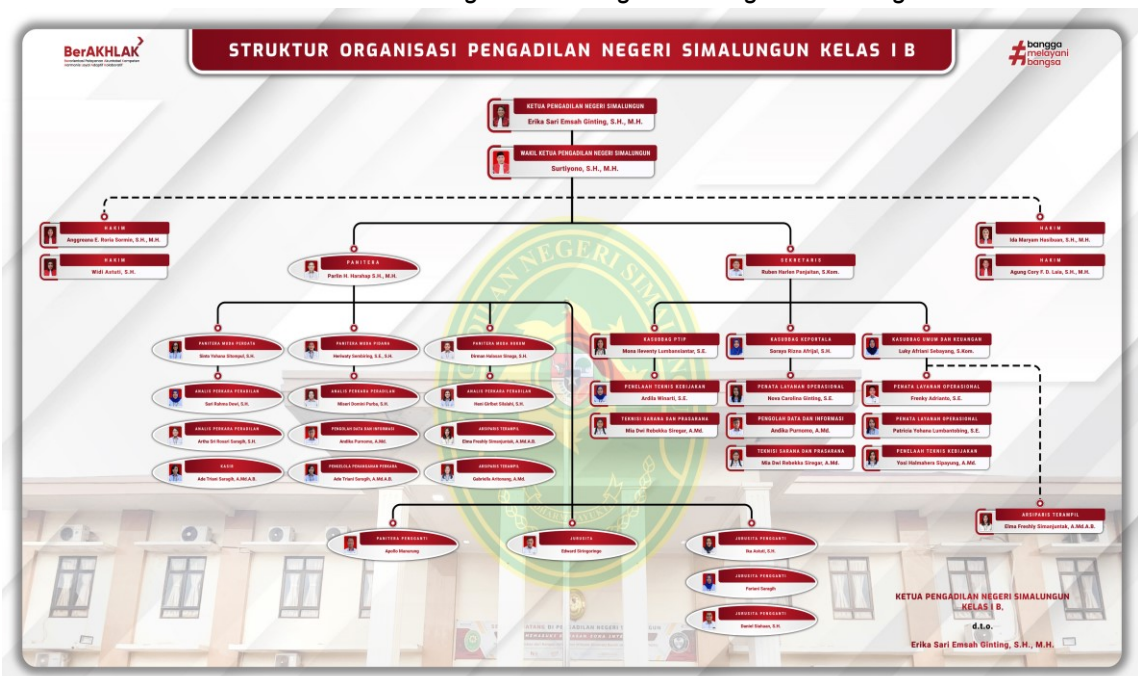
DAYA

MANUSIA



Pengadilan Negeri Simalungun merupakan salah satu instansi pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan publik, dimana pengelolaan sumber daya manusia (aparatur Pegawai Negeri Simalungun) yang ada diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan prima.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

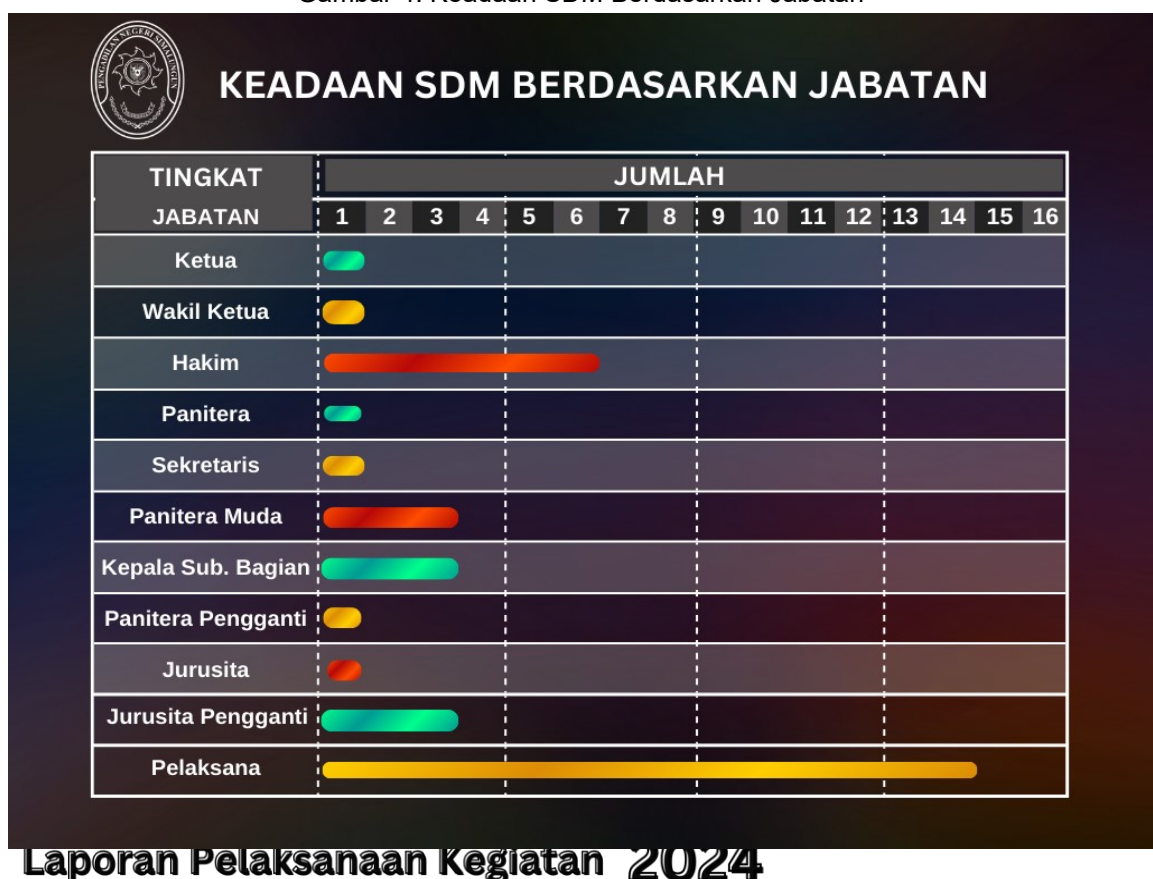
Tabel 22. SDM Pengadilan Negeri Simalungun Berdasarkan Pangkat/ Gol Ruang

No.	Nama	Jabatan	Pangkat
1	ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH., M.H.	Ketua	IV/b
2	SURTIYONO, S.H., M.H.	Wakil Ketua	IV/b
3	ANGGREANA ELISABETH RORIA SORMIN, S.H. M.H.	Hakim	IV/a
4	WIDI ASTUTI, S.H.	Hakim	IV/a
5	IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H.	Hakim	III/d
6	AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H., M.H.	Hakim	III/d
7	PARLIN HALOMOAN HARAHAH, S.H., M.H.	Panitera	IV/a
8	RUBEN HARLEN PANJAITAN, S.Kom	Sekretaris	III/d
9	HERIWATY SEMBIRING, S.E, S.H	Panitera Muda Pidana	III/d
10	SINTO YOHANA SITOMPUL, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/d
11	DIRMAN HALASAN SINAGA, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
12	SORAYA RIZNA AFRIJAL, S.H.	Kasub Bag Keportala	III/d
13	MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S.E.	Kasub Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	III/c
14	LUKY AFRIANI SEBAYANG, S.Kom	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	III/c
15	APOLLO MANURUNG	Panitera Pengganti	III/c
16	EDWARD SIRINGORINGO	Jurusita	III/b
17	IKA ASTUTI, S.H.	Jurusita Pengganti	III/c
18	FARIANI SARAGIH	Jurusita Pengganti	III/b
19	NOVA CAROLINA GINTING, S.E.	Operator-Penata Layanan Operasional	III/b
20	FRENKY ADRIANTO T, S.E	Operator-Penata Layanan Operasional	III/a
21	ARDILA WINARTI, S.E	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	III/a
22	SARI RAHMA DEWI, S.H	Klerek-Analis Perkara Peradilan	III/a



23	PATRICIA LUMBANTOBING, S.E	YOHANA	Operator-Penata Layanan Operasional	III/a
24	DANIEL SIAHAAN		Jurusita Pengganti	III/a
25	ANDIKA PURNOMO, A.MD		Klerek-Pengolah Data dan Informasi	III/a
26	MISERI DOMINI PURBA, S.H.		Klerek- Analis Perkara Peradilan (CPNS)	III/a
27	ARTHA SRI ROSARI SARAGIH, S.H.		Klerek- Analis Perkara Peradilan (CPNS)	III/a
28	HENI GIRLBET SILALAH, S.H.		Klerek- Analis Perkara Peradilan (CPNS)	III/a
29	YOSI HALMAHERA SIPAYUNG, A.Md		Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	II/d
30	MIA DWI REBEKKA SIREGAR, A.Md		Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana	II/d
31	ELMA FRESHLY SIMANJUNTAK, A.Md.A.B.		Arsiparis	II/d
32	ADE TRIANI SARAGIH, A.Md.A.B		Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	II/c
33	GABRIELLA ARITONANG, A.Md		Arsiparis	VII

Gambar 4. Keadaan SDM Berdasarkan Jabatan



Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pangkat / Golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat

No	Jabatan	Pangkat							
		VII	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a
1	Ketua								1
2	Wakil Ketua								1
3	Hakim							2	2
4	Panitera							1	
5	Sekretaris							1	
6	Panitera Muda							3	
7	Kasubbag						2	1	
8	Panitera Pengganti						1		
9	Jurusita					1			
10	Jurusita Pengganti				1	1	1		
11	Pelaksana	1	1	3	7	2			
	Jumlah	1	1	3	8	4	4	7	3

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				
		SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Ketua				1	
2	Wakil Ketua				1	
3	Hakim			1	3	
4	Panitera				1	
5	Sekretaris			1		
6	Panitera Muda			3		
7	Kasub. Bag			3		
8	Panitera Pengganti	1				
9	Jurusita	1				
10	Jurusita Pengganti	1		2		
11	Pelaksana		6	8		
	Jumlah	3	6	18	6	0

A. MUTASI

Mutasi pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari mutasi masuk dan mutasi keluar. Pada tahun 2024 Hakim dan Pegawai yang mutasi adalah sebagai berikut

1. Mutasi Masuk

Tabel 25. Keadaan Mutasi Masuk Tahun 2024

No	Nama/ NIP	Gol/ Ruan g	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Surtiyono, S.H., M.H.	VI/b	Hakim PN Yogyakarta	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
2	Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.	IV/a	Panitera Muda Perdata PN Medan	Panitera PN Simalungun
3	Dirman Halasan Sinaga, S.H.	III/d	Panitera Muda Hukum PN Balige	Panitera Muda Hukum PN Simalungun
4	Mia Dwi Rebekka Siregar, A.Md	II/d	Operator-Teknisi Sarpas PN Kabanjahe	Operator-Teknisi Sarpras PN Simalungun
5	Andika Purnomo, A.Md	III/a	Operator-Teknisi Sarpras PN Tarutung	Klerek-Pengolah Data Informasi PN Simalungun
6	Miseri Domini Purba, S.H	III/a	-	CPNS (Klerek-Analis Perkara Peradilan)
7	Heni Girlbet Silalahi, S.H.	III/a	-	CPNS (Klerek-Analis Perkara Peradilan)
8	Artha Sri Rosari Saragih, S.H	III/a	-	CPNS (Klerek-Analis Perkara Peradilan)

2. Mutasi Keluar

Tabel 26. Keadaan Mutasi Keluar Tahun 2024

No	Nama/NIP	Gol/ Ruan g	Jabatan/Unit Kerja	
			Lama	Baru
1	Yudi Dharma, S.H., M.H.	IV/a	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Hakim Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Khusus
2	Dessy Deria E Ginting, S.H., M.Hum	IV/a	Hakim Pengadilan Negeri Simalungun	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas IA Khusus

3	Amiruddin, S.H., M.H.	IV/a	Panitera Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Pengadilan Negeri Stabat
4	Ronald J Tampubolon, S.H., M.H.	IV/a	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Sibuhuan Kelas II
5	Usaha Sembiring, S.H.	III/c	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Muda Hukum Rantau Prapat
6	Gartilan Marnaek, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Muda Hukum Pematangsiantar
7	Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.	III/b	Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Simalungun	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Rekapitulasi Mutasi Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
		Hakim	Teknis	Non Tekn	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PN Simalungun	1	2	5	8	2	4	1	7

B. PROMOSI

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Rekapitulasi Promosi Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Jabatan				Panitera pengganti	Jumlah
		Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Panmud		
	PN Simalungun	-	1	1	2	1	5

C. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rekapitulasi Pensiun Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Sebab Pensiun			Jumlah
		Batas Usia	Meninggal	Pensiun Dini	
	PN Simalungun		-	-	-

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yang pensiun Tahun 2024 :

Tabel 30. Daftar Nama Aparatur Yang Pensiun Tahun 2024

No	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan	TMT Pensiun
1	-	-	-	-

D. DIKLAT (SDM TEKNIS/ NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Rekapitulasi Diklat SDM Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Jenis Diklat					
		Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Manajemen	Latsar CPNS
1	PN Simalungun	-	-	7	1	11	-

Berikut daftar nama Hakim dan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024 :

Tabel 32. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat Tahun 2024

No	Nama/NIP	Nama Diklat	Penyelenggara
1	Erika Sari Emsah Ginting,	Bimbingan Teknis	Pengadilan

	S.H., M.H.	Administrasi dan Administrasi Yudisial	Tinggi Medan
		Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
3	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi dan Administrasi Yudisial	Pengadilan Tinggi Medan
		Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan TUN seluruh Indonesia angkatan XX Tahun 2024	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung
3	Widi Astuti, S.H.	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
4	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan TUN seluruh Indonesia angkatan XX Tahun 2024	Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung
5	Amiruddin, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Administrasi dan Administrasi Yudisial	Pengadilan Tinggi Medan
8	Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara (Batch V) Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI	Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI
9	Luky Afriani Sebayang,	Pelatihan SPIP	Badan Strategi

	S.Kom	Integratif Gelombang II Tahun 2024 secara Online	Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
		Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Angkatan I Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaaan Negara dan Perimbangan Keuangan
		Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Kementrian Keuangan
		Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Miik Negara (Batch V) Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI	Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan MA RI
10	Nova Carolina Ginting, S.E	Bimtek Proses Penyampaian LPJ Penerimaan Melalui Aplikasi SAKTI	KPPN Pematangsiantar
11	Frenky Adrianto Tampubolon, S.E.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Kementrian Keuangan
12	Patricia Yohana Lumbantobing, S.E.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2	Kementrian Keuangan Medan
		Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (<i>Blended Learning</i>) Angkatan I Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaaan Negara dan Perimbangan Keuangan
13	Ardila Winarti, S.E.	E-Learning Bendahara	Pusat Pendidikan dan



		Penerimaan Angkatan XII Tahun 2024	Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan
14	Elma Freshly Simanjuntak, A.Md.A.B	Pelatihan Pengelola Arsip Dinamis	Pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional RI
15	Ade Triani Saragih, A.Md.A.B	Pelatihan Jarak Jauh Bendaraha Pengeluaran Tahun Anggaran 2024	Pusat Pendidikan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan



BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN

PUBLIK





A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 01 dan DIPA 03 Badan Peradilan Umum 03 dengan keterangan sebagai berikut:

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi kode satker 400370 dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.400370/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 5.399.187.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak mengalami perubahan pada DIPA 01, selama tahun 2024 melakukan revisi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2022	Rp 5.399.187.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
3	Revisi Ke- 2	23 April 2024	Rp 5.399.187.000	Revisi POK

				dan update Hal.III DIPA
4	Revisi Ke- 3	7 Juni 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi Eselon I (ABT)
5	Revisi Ke- 4	15 Juli 2024	Rp 5.495.187.000	Revisi POK dan update Hal.III DIPA
6	Revisi Ke- 5	16 Oktober 2024	Rp 5.590.185.000	Revisi Eselon I (ABT)
7	Revisi Ke- 6	4 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Revisi Eselon I (Penarikan Anggaran Belanja Pegawai)
8	Revisi Ke- 7	9 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA
9	Revisi Ke- 8	24 Desember 2024	Rp 5.340.185.000	Pemutakhiran KPA

Dengan realisasi anggaran DIPA 01 tahun 2024 sebesar 5.292.776.861,- atau 99,11% dari jumlah pagu sebesar Rp 5.340.185.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33. Realisasi Anggaran DIPA 400370 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.340.185.000	5.292.776.861	99,11%	47.408.139	0,89%
001	Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.816.482.000	3.769.542.694	98,77%	46.939.306	1,23%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.589.208.000	1.589.201.820	100,00 %	6.180	0,00%



511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000	24.940	95,92%	1.060	4,08%
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100.794.000	100.792.310	100,00 %	1.690	0,00%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.510.000	33.686.064	97,61%	823.936	2,39%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29.000.000	29.000.000	100,00 %	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.429.110.000	1.429.110.000	100,00 %	0	0,00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	177.876.000	176.578.070	99,27%	1.297.930	0,73%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80.000.000	79.734.420	99,67%	265.580	0,33%
511129	Belanja Uang Makan PNS	293.675.000	251.987.000	85,80%	41.688.000	14,20%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24.575.000	24.575.000	100,00 %	0	0,00%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.024.000	40.023.200	100,00 %	800	0,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000	1.090	12,11%	7.910	87,89%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.404.000	857.640	61,09%	546.360	38,91%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.000	0	0,00%	3.000	100,00%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00 %	0	0,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.968.000	1.231.140	41,48%	1.736.860	58,52%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.840.000	93,33%	560.000	6,67%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.523.703.000	1.523.234.167	99,97%	468.833	0,03%
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	475.948.000	475.689.452	99,95%	258.548	0,05%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	415.928.000	415.669.452	99,94%	258.548	0,06%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00 %	0	0,00%
B	Langganan Daya dan Jasa	181.519.000	181.313.228	99,89%	205.772	0,11%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	170.444.000	170.443.194	100,00 %	806	0,00%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	5.809.200	96,82%	190.800	3,18%
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.193.244	99,44%	6.756	0,56%
522113	Belanja Langganan Air	600.000	592.590	98,77%	7.410	1,24%
522141	Belanja Sewa	3.275.000	3.275.000	100,00 %	0	0,00%
C	Pemeliharaan Kantor	680.262.000	680.257.487	100,00 %	4.513	0,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	358.220.000	358.220.000	100,00 %	0	0,00%

523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	114.452.000	114.451.675	100,00 %	325	0,00%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.590.000	207.585.812	100,00 %	4.188	0,00%
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	70.832.000	70.832.000	100,00 %	0	0,00%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27.680.000	27680000	100,00 %	0	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43.152.000	43152000	100,00 %	0	0,00%
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	27.120.000	27.120.000	100,00 %	0	0,00%
G	Rapat Koordinasi Internal	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.732.000	6.732.000	100,00 %	0	0,00%
H	Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.530.000	73.530.000	100,00 %	0	0,00%
I	Konsultasi Ke KPPN/KANWIL/KPKNL /BKN	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.760.000	7.760.000	100,00 %	0	0,00%

2. DIPA 03 Badan Urusan Administrasi kode satker 400371 dengan SP DIPA-005.03.2.400371/2024 tanggal 24 November 2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selama tahun 2024 melakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA Awal	24 November 2023	Rp 312.500.000	Pagu Awal
2	Revisi Ke- 1	7 Februari 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
3	Revisi Ke- 2	19 April 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
4.	Revisi Ke- 3	9 Juli 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
5.	Revisi Ke- 4	4 Oktober 2024	Rp 312.000.000	Perubahan Hal. III DIPA
6	Revisi Ke- 5	24 desember	Rp 312.000.000	Pemutakhiran



	2024		KPA
--	------	--	-----

Dengan realisasi anggaran DIPA 03 tahun 2024 sebesar 312.247.950,- atau 99,92% dari jumlah pagu sebesar Rp 312.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 34. Realisasi Anggaran DIPA 400371 Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/Sub Komponen/Detail	Pagu DIPA	Realisasi Pagu		Sisa Pagu	
			Total	%	Total	%
400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	312.500.000	312.247.950	99,92%	252.050	0,08%
1049.AEA	Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.AEA.0 01	Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00%	0	0,00%
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
1049.BCA. U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	275.000.000	274.747.950	99,91%	252.050	0,09%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
A	TANPA SUB KOMPONEN	135.718.000	135.603.500	99,92%	114.500	0,08%
521211	Belanja Bahan	4.264.000	4.264.000	100,00%	0	0,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	131.454.000	131.339.500	99,91%	114.500	0,09%
053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
A	TANPA SUB KOMPONEN	20.550.000	20.530.035	99,90%	19.965	0,10%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.700.000	5.680.035	99,65%	19.965	0,35%

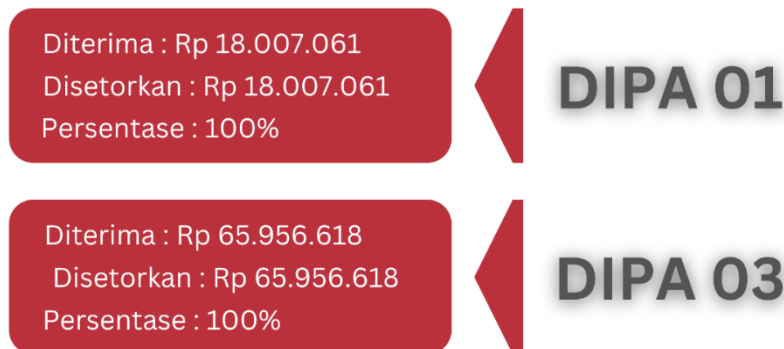


524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.850.000	14.850.000	100,00%	0	0,00%
054	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
521211	Belanja Bahan	56.450.000	56.450.000	100,00%	0	0,00%
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
A	TANPA SUB KOMPONEN	7.064.000	7.032.400	99,55%	31.600	0,45%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.114.000	2.082.400	98,51%	31.600	1,49%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.950.000	100,00%	0	0,00%
056	Minutasi/Upaya hukum	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
A	TANPA SUB KOMPONEN	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
521211	Belanja Bahan	9.660.000	9.625.290	99,64%	34.710	0,36%
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
A	TANPA SUB KOMPONEN	27.660.000	27.620.135	99,86%	39.865	0,14%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.560.000	10.520.135	99,62%	39.865	0,38%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.100.000	17.100.000	100,00%	0	0,00%
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
A	TANPA SUB KOMPONEN	17.898.000	17.886.590	99,94%	11.410	0,06%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.048.000	6.036.590	99,81%	11.410	0,19%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.850.000	11.850.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
051	Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
A	TANPA SUB KOMPONEN	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%

522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00%	0	0,00%
--------	---------------------------	------------	------------	---------	---	-------

Selain itu, terdapat pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Buksn Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun baik PNBP DIPA 01 maupun PNBP DIPA 03, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 5. Penerimaan PNBP 2024



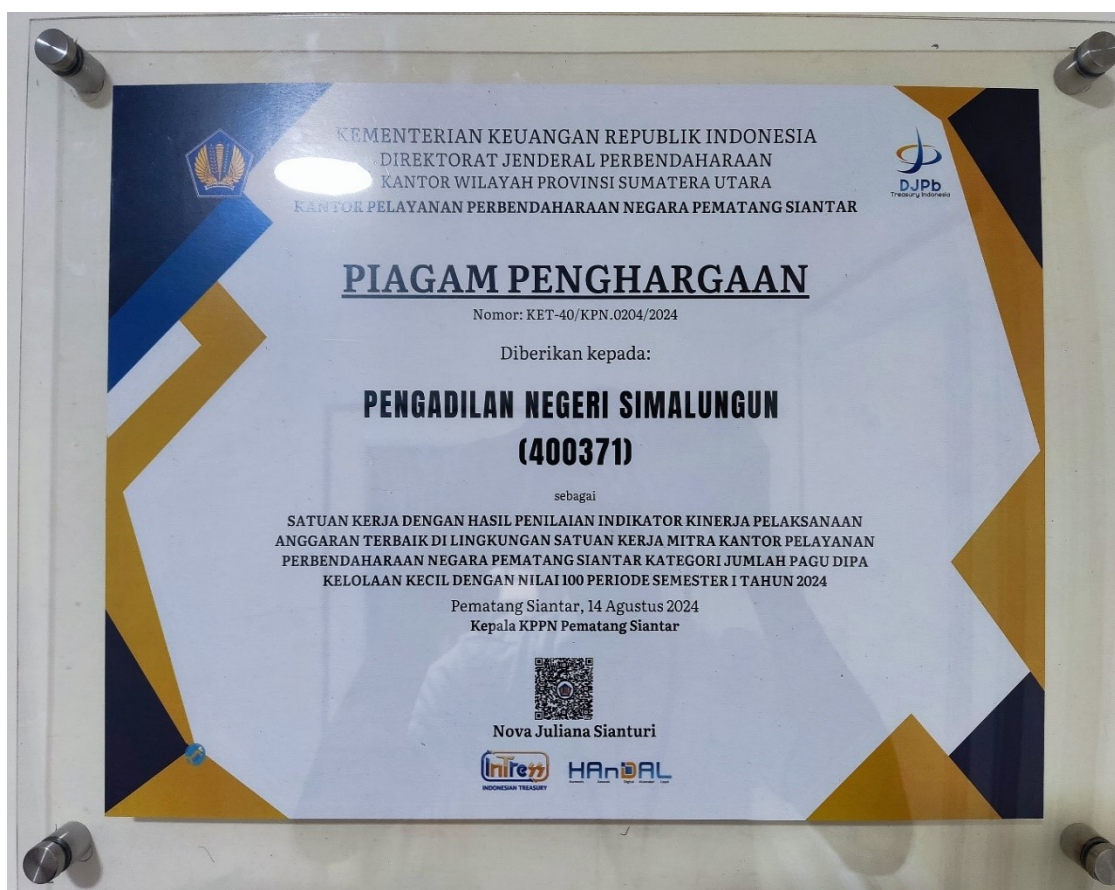
Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Simalungun berhasil mendapatkan berbagai penghargaan antara lain:

1. Peringkat Pertama IKPA Kategori Pagu DIPA Kecil Semester II Tahun 2023 yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024
2. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Kecil Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024.
3. Satuan Kerja dengan Hasil Penilaian IKPA Terbaik di Lingkungan Satker Mitra KPPN Pematangsiantar Kategori Jumlah Pagu Dipa Sedang Dengan Nilai 100- Periode Semester I Tahun 2024 tang diterima pada tanggal 14 Agustus 2024.

Prestasi ini merupakan suatu keberhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam mengelola keuangan yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Gambar 5. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar.





B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Tabel 35. Keadaan Kendaraan Dinas TA. 2024

NO	URAIAN	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1	Innova Zenix	2023	v			Pemkab
2	Kijang Innova 1002 T	2008		v		MARI
	Kijang Innova 1265 T	2011	v			MARI
II	Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro 2376 T	2008	v			MARI
2	Supra 125 2377 T	2008	v			MARI
3	Supra 125 2006 T	2006	v			MARI
4	Supra 125 2005 T	2006	v			MARI

2. Rumah Dinas

Tabel 36. Keadaan Rumah Dinas TA. 2024

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	v			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	V			
3	Rumah Dinas Hakim	3	v			
4	Rumah Dinas Panitera	1	V			
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	v			

3. Sarana Dan Prasarana

Tabel 37. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas TA. 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Sarana Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	2	
4.	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Media Center	1	
7	Ruang Dyk	1	
8	Ruang Perpustakaan	1	
9	Ruang Sidang Umum	3	
10	Ruang Sidang Anak	1	
11	Ruang Tahanan	3	
12	Ruang PTSP	1	
13	Ruang Posbakum	1	
14	Ruang Tamu Terbuka	1	
15	Ruang Umum dan Keuangan	1	
16	Ruang Kepegawaian	1	
17	Ruang PTIP	1	
18	Ruang Arsip	1	
19	Ruang Panitera Pengganti	1	
20	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1	
21	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1	
22	Ruang Kepaniteraan Muda Perdata	1	
23	Ruang Mediasi dan Diversi	1	
24	Ruang Kaukus	1	
25	Ruang Kesehatan	1	
26	Ruang Laktasi	1	
27	Ruang Advokat	1	
28	Ruang Jaksa	1	
29	Ruang Ramah Anak Perempuan	1	
30	Ruang Ramah Anak Laki - Laki	1	
31	Ruang BAPAS/Pekerja Sosial	1	
32	Ruang Tunggu Sidang/Mediasi	1	
33	Ruang Kantin Pegawai	1	
34	Ruang Pantri	1	
35	Ruang Janitor	1	
36	Ruang Ruang ATK	1	



37	Toilet Pegawai	2	
38	Toilet Pengunjung Perempuan	1	
39	Toilet Pengunjung Laki-laki	1	
40	Toilet Disabilitas	2	
41	Toilet Pengunjung	1	
42	Kantin Pengunjung	1	
43	Parkir Sepeda Motor Pegawai	1	
44	Musala	1	
45	Rumah Genset	1	
II	Sarana Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Kipas Angin	10	
2	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	
3	Loudspeaker	5	
4	Bracket Standing Peralatan	1	
5	Server	4	
6	CCTV - Camera Control Television System	2	
7	Mesin Absensi	1	
8	Rak Peralatan	1	
9	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
10	Alat Kantor Lainnya	1	
11	Bangku Panjang Besi/Metal	7	
12	Microphone	2	
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	
14	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	
15	Mesin Antrian	1	
16	Microphone/Wireless MIC	1	
17	Sice	7	
18	Microphone Table Stand	6	
19	P.C Unit	27	
20	Lap Top	20	
21	Switch	10	
22	Lemari Besi/Metal	2	
23	White Board	3	
24	Meja Rapat	3	
25	Meja Resepsionis	1	
26	Telephone Mobile	1	
27	Mic Conference	3	
28	Palu Sidang	2	
29	Audio Amplifier	1	
30	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	
31	Firewall	1	
32	Camera Conference	1	
33	Tablet PC	1	
34	Kursi Besi/Metal	126	
35	Bangku Panjang Kayu	18	
36	A.C. Split	25	
37	Local Area Network (LAN)	1	
38	Tiang Bendera	11	
39	Wireless Access Point	12	
40	Lemari Kayu	21	
41	Ethernet Converter	7	

42	Kursi Kayu	8	
43	Sound System	2	
44	Lambang Instansi	1	
45	Komputer Jaringan Lainnya	1	
46	Rak Server	4	
47	Router	1	
48	Filing Cabinet Besi	12	
49	Brandkas	1	
50	Meja Kerja Kayu	87	
51	Facsimile	1	
52	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	
53	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	
54	Rak Besi	6	
55	LCD Monitor	10	
56	Video Monitor	1	
57	Genset	1	
58	Monografi	53	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Simalungun menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing – masing aplikasi dilakukan secara rutin. Pengadilan Negeri Simalungun telah dilengkapi dengan sistem IT yang mumpuni, berikut perangkat keras IT yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun :

1. Perangkat Lunak (*Software*)

- a. Website Pengadilan Tinggi Simalungun (www.pn-simalungun.go.id)

Yang mana isi dalam website Pengadilan Negeri Simalungun telah disesuaikan dengan

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.



b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan,



maupun pihak eksternal pengadilan. Sampai dengan saat ini SIPP Pengadilan Negeri Simalungun secara aktif melakukan update sampai dengan versi 5.6.4 dan sinkronisasi data SIPP ke Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung.

c. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIKEP adalah

pengelolaan data kepegawaian secara elektronik melalui sistem informasi berbasis web



yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pegawai diantaranya untuk abensi online, proses pembaharuan data pegawai, dus, duk dan lain sebagainya.

d. E-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi tersebut adalah suatu revolusi bagi dunia peradilan karena dalam aplikasi tersebut telah mendukung e-Filing (Pendaftaran Online), e- Payment (Pembayaran Online), eSummons (Panggilan Elektronik) dan e-Litigasi (Persidangan Online).



e. Direktori Putusan

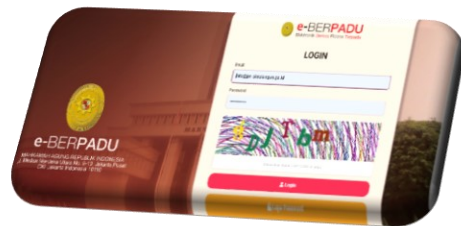
Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk

mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.



f. e-Berpadu

e-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan



izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin pembantaran, permohonan izin besuk secara elektronik, penetapan diversi, permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan sebagainya.

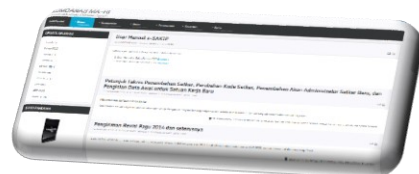
g. E-Plans

Sebuah Sistem Untuk Menyusun Anggaran Dengan Tahapan Berjenjang Pada Satuan Kerja Di Bawah Mahkamah Agung RI.



h. Komdanas

Komdanas merupakan singkatan dari Komunikasi Data Nasional sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.



i. MIS (Monitoring Implementasi SIPP)

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau penerapan penggunaan aplikasi SIPP.



j. EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)

Salah satu aplikasi berbasis website dari Mahkamah Agung yang digunakan oleh Badan Peradilan Umum untuk memantau kinerja dari Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.



k. Dan aplikasi pendukung kinerja lainnya seperti PTSP, e-Survey, e-BIMA, Pelaporan Badilum, Simari, e-Sadewa, e-Survei, dll.

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Simalungun berupa :

Tabel 38. Keadaan Server 2024

No	Nama Barang	Type/Merk	Keterangan
1	Server	Server <i>fujitsu</i> RX2520M5 32 GB	server Tipe A Satker 3T
2	Server	Server RX2520M5 w/ <i>win storage server</i>	Server Storage Eselon 1
3	Laptop	Fujitsu intel core i3	Laptop
4	Rak server	AR3104 RAK dan PDU - APC	Rak Server Room
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS - APC SMT2200RM12UNC	UPS
6	Rak Server	<i>Indorack RAK PDU</i>	Rack Network Wallmount
7	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Distribusi Tipe 2
8	Switch	Ruckus ICX7250-24P-2X10G	Switch Access PoE
9	<i>Ethernet Converter</i>	Ruckus 10GbE Direct Attach 10G-SFP-TWX-0101	DAC
10	<i>Wireless Access</i>	Ruckus R550-WW00	Access Point

	<i>Point</i>		
11	<i>Firewall</i>	<i>Palo Alto Networks PA-220</i>	<i>Firewall</i>

Pengadilan Negeri Simalungun juga dilengkapi dengan jaringan internet menggunakan provider fibernet, dengan kecepatan 100 Mbps *dedicated*. Tentu saja hal itu sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang saat ini menggunakan SIPP versi 5.6.4 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.6.4 Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

3. Implementasi E-Court Pengadilan Negeri Simalungun

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Simalungun sudah menerapkan dengan menerima pendaftaran perkara perdata melalui www.ecourt.mahkamahagung.go.id dan juga telah melaksanakan persidangan secara e-litigasi. Adapun data perkara yang melalui e-court dan e-litigasi adalah sebagai berikut :

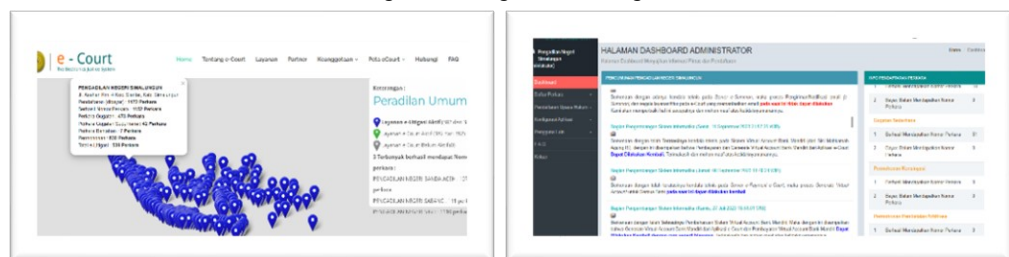
Tabel 39. Keadaan Perkara E-court dan E-Litigasi Tahun 2024

No	Perkara	Perkara Masuk Non E-Court	E-Court	E-Litigasi
1	Gugatan	176	176	41
2	Permohonan	248	248	0
3	Gugatan Sederhana	9	9	0
4	Bantahan	11	11	2
Jumlah		444	444	43

Sebagai salah satu dukungan terhadap implementasi *e-Court*, Pengadilan Negeri Simalungun juga telah menyediakan Meja *e-Court* dan Duta *E-Court* dimana para calon pengguna terdaftar dan atau pengguna lain dapat dibantu untuk proses mendapatkan akun. Selain itu, Meja *e-Court* juga dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Terdaftar dan atau Pengguna Lain untuk mendaftarkan perkaranya.

Banner dan brosur yang memuat berbagai informasi tentang *e-Court* juga tersedia pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Simalungun. Saat ini sudah tidak ada kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Simalungun dalam implementasi *e-court* dan *e-litigasi* karena para pencari keadilan sudah banyak yang melek teknologi dan merasakan kemudahan dan manfaat yang luar biasa dengan adanya *e-court* dan *e-litigasi*.

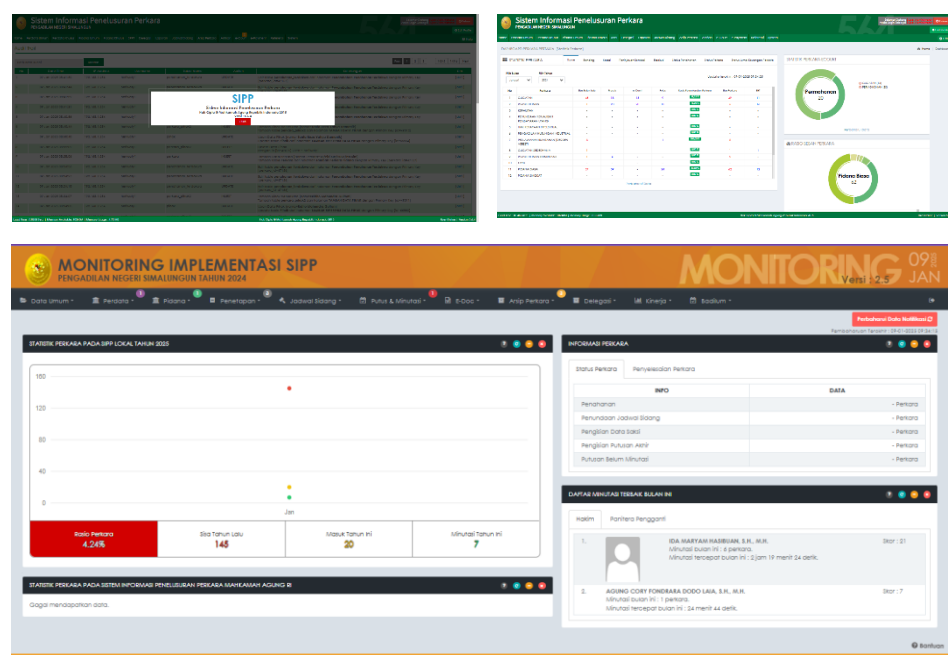
Gambar 7. Peta E-Court Seluruh Indonesia dan Tampilan E-Court Pengadilan Negeri Simalungun



4. Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun saat ini menggunakan SIPP versi 5.6.4 dan untuk aplikasi MIS menggunakan versi 5.6.4. Versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung RI.

Gambar 8. Tampilan SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Simalungun





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK





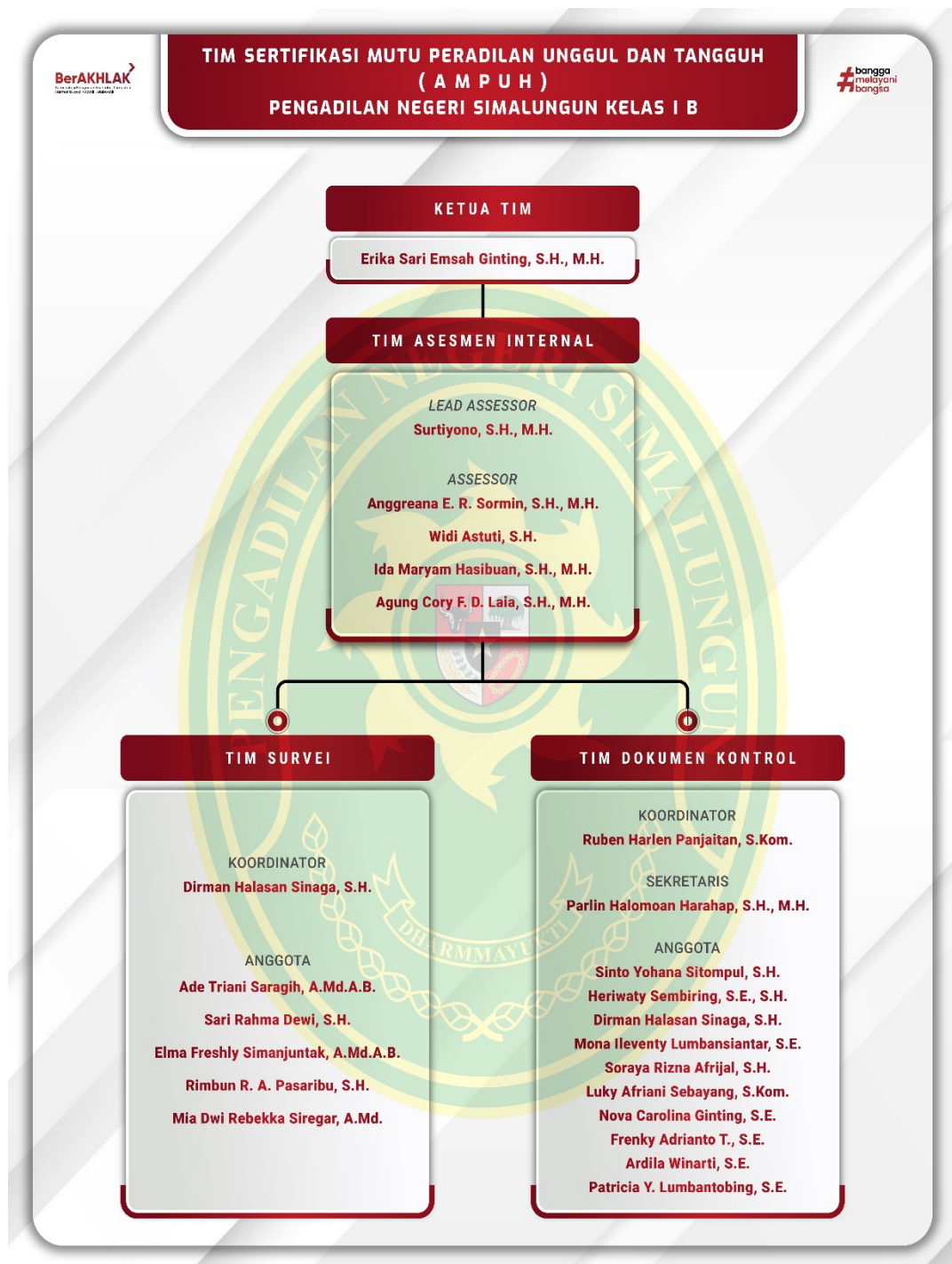
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangsung sejak tahun 2014. Upaya memperoleh akreditasi dilakukan untuk menjamin bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan upaya dalam pelayanan publik dengan baik, sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri, dalam upaya mewujudkan “Performa Badan Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesian Court Performance-Excellent / ICPE).

Namun program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan ini perlu ditingkatkan sehingga pada tahun 2024 adanya program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum. Tujuan dari AMPUH adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Simalungun telah membentuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 107/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut :

Gambar 9. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Simalungun



Agar dapat mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari Pimpinan sampai dengan PPNP di Pengadilan Negeri Simalungun. Beberapa langkah tersebut adalah :

1. **Pelaksanaan bidang teknis (core business)** meliputi:
 - a. Meningkatkan manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara, kompetensi dan integritas tenaga teknis;

Gambar 10 Penandatanganan Pakta Integritas dan Rapat Kepaniteraan



- b. Meningkatkan tertib administrasi upaya hukum banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali;

Gambar 11 Monitoring dan evaluasi terhadap upaya hukum



- c. Meningkatkan proses perkara yang tepat waktu;

Gambar 12 Court Calender

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Selamat Datang WELASITUM, S.H.

Anda Login Sebagai **Hakim**

Keluar

Perkara Yang Ditangani

Edit Profile

Home

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana Umum

Pidana Khusus

SPPT

Delogasi

Laporan

Jadwal Sidang

Anip Perkara

Antisan

Referensi

Help

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Saksi Yang Dihadirkan

Tambah Data Tuntutan

Draft Putusan Seta

Tambah Putusan Seta

Draft Putusan Akhir

Pilih Tautan

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
248/Pid.Sus/2024/PN Sim (e-Berpadu)	SANDA WIARHAN YAHYA GULTOM, SH	Ricki Chalk Pane alias Kiki	Sidang pertama

Data Umum

Penetapan

Court Calendar

Jadwal Sidang

Isangak Bukti

Riwayat Perkara

Tambah Court Calendar

Cetak

NO	Tanggal	Pukul	Agenda/Acara Sidang	Keterangan
1	Selasa, 06 Agu. 2024	Pukul : 10:00 s.d selesai	pembacaan dakwaan	-
2	Selasa, 13 Agu. 2024	Pukul : 10:00 s.d selesai	pemeriksaan saksi dan terdakwa	-

Load Time : 0.0220 Sec. | Memory Available: 10240M | Memory Usage : 5.5 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online : 1 Viewing 5.5

- d. Meningkatkan pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen, dan persyaratan yang diperlukan;

Gambar 12 WA Bot AYA (Ask Your Assistant)



- e. Meningkatkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu;

Gambar 13 MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum pada tahun 2024



- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, kepastian hukum, dan kualitas serta konsistensi putusan.

Gambar 14 Pelaksanaan Public Campaign tahun 2024



2. Pelaksanaan bidang non teknis/ pendukung (supporting unit) :

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia;

Gambar 15 Jadwal DDTK tahun 2024

JADWAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA (DDTK) TAHUN 2024

NO	JUDUL BIMTEK	PEMATERI	BULAN PELAKSANAAN	PESERTA BIMTEK
1	Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Berdasarkan SEMA I Tahun 2023	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	April 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
2	Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice pada Pengadilan Negeri Simalungun	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Mei 2024	Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
3	Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perdata	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juni 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
4	Administrasi Keuangan Perkara Perdata, Biaya Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	Yudi Dharma, S.H., M.H.	Juli 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)
5	Pemberkasan Arsip Perkara Yang Telah Diminutasi	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Agustus 2024	Hakim, Kepaniteraan (Panitera, PP, JS/JSP/ Para Pelaksana Kepaniteraan)

NB. Pelaksanaan bisa kondisional dan akan diinfokan melalui whatsapp group

Mengetahui,
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,
ERIKASARI EMSAH GINTING

- b. Meningkatkan pengelolaan keuangan;

Gambar 16 menerima penghargaan dari KPPN Pematangsiantar



c. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana;

Gambar 17 Penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2024



d. Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi

Gambar 18 Back up SIPP dan Ruang Server

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

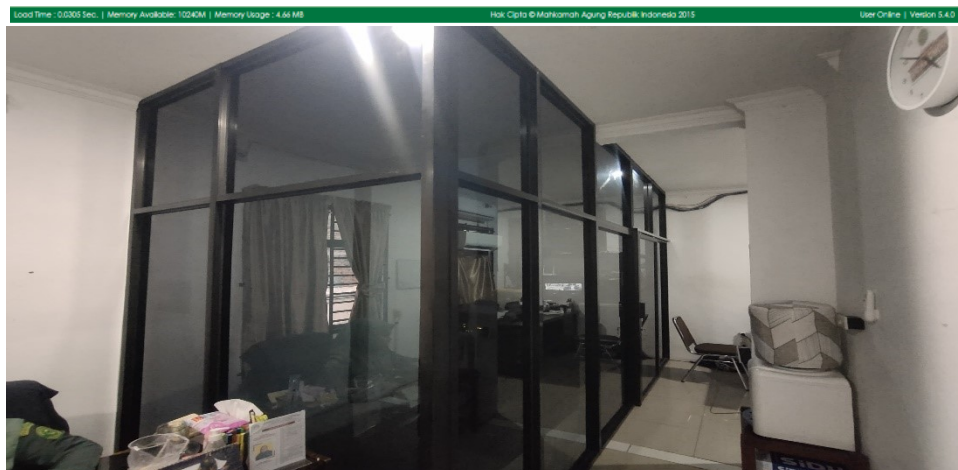
Home | Pendaftaran Umum | Pendaftaran Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SIPP | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Aniso Perkara | Antrian | e-Court | e-Payment | Referensi | System | Help

BACKUP DATABASE

Current Date: Jumat, 15 Mar. 2024
Current Time: 10:49:00

backup Database backup App

No	Type	Tanggal Backup	Waktu	Filename	
1	Database	Rabu, 13 Mar. 2024	08:19:10	backup_sivichute_data_db_2024-03-13_jam_08_19_10.zip	download hapus



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PTSP Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B, yang merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, sudah aktif dilaksanakan sejak tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B Nomor 14/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2023 tanggal 15 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada ketentuan yang ada pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Tata ruang PTSP Pengadilan Negeri Simalungun juga sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan tersebut. Pada tahun 2019, PTSP dilengkapi dengan Meja Inzaghe dan Meja e-Court sesuai amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat dua kali dalam setahun sejak tahun 2016. Survei dilaksanakan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan secara elektronik dengan aplikasi SiSUPER. Pelaksanaan survei dilakukan empat kali dalam setahun sejak tahun 2021 sesuai dengan SK Dirjen Badlum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badilum dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Gambar 19. Tampilan Aplikasi Survei SiSUPER



Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 20. IKM TW I



Tabel 40. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2024

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,763	Sangat Baik	8
2.	Prosedur	3,757	Sangat Baik	9
3.	Waktu Pelayanan	3,789	Sangat Baik	6
4.	Biaya dan Tarif	3,796	Sangat Baik	4
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,783	Sangat Baik	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,796	Sangat Baik	5
7.	Perilaku Pelaksana	3,816	Sangat Baik	3
8.	Sarana dan Prasarana	3,849	Sangat Baik	2
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,987	Sangat Baik	1

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 41. Keadaan Pelayanan PTSP Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Jumlah Layanan di PTSP	Jumlah Permohonan Layanan	Keterangan
1	PN Simalungun	4	Hukum : 409 Pidana : 116 Perdata : 595 Umum : 1	1.171

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, Pengadilan Negeri Simalungun terus meningkatkan pelayanan publik dengan membuat inovasi, baik

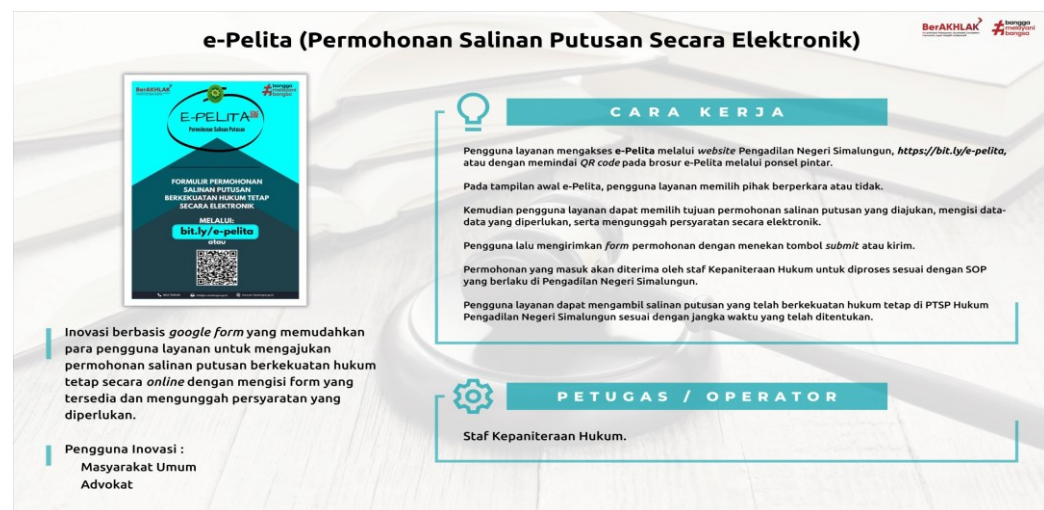
dari fasilitas yang ada, maupun dari pelayanannya. Hal ini tak lain sebagai salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung yaitu Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, dan pelayanan yang prima. Pengadilan Negeri Simalungun juga memberikan informasi secara online yaitu bisa melalui website dan media sosial lainnya.

Pengadilan Negeri Simalungun juga telah membentuk Tim Penanggung Jawab Inovasi sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/KPN/SK.KP3.1.3/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 serta rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang ada.

1. Jenis Inovasi Pelayanan Publik

a. E-Pelita

Gambar 21. Deskripsi Inovasi E-Pelita



g. E-Pesona

Gambar 22. Deskripsi Inovasi E-Pelita



h. Syparis

Gambar 21. Deskripsi Inovasi Syparis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

S Y P A R I S



Merupakan metode pembayaran panjar biaya perkara perdata secara *easy pay* menggunakan QRIS, dimana pihak berperkara dapat melakukan pembayaran dengan memindai *QR code* melalui berbagai *platform* pembayaran digital.

Pengguna Inovasi :
Pihak yang melakukan pendaftaran perkara perdata

CARA KERJA

Pengguna layanan masuk / *login* ke aplikasi pembayaran digital yang mendukung metode pembayaran dengan menggunakan QRIS.

Pengguna layanan kemudian memindai *QR code* yang telah tersedia pada *flyer* QRIS melalui fitur *scan* QRIS pada aplikasi pembayaran digital yang digunakan.

Pengguna layanan memasukkan nominal panjar biaya perkara perdata yang harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada SKUM, kemudian melakukan autentikasi transaksi dengan memasukkan PIN / *password* pada aplikasi pembayaran yang digunakan.

Apabila transaksi berhasil dilakukan, pengguna layanan akan menerima notifikasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan.

Selanjutnya pembayaran akan dicek oleh Kasir untuk kemudian diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

PETUGAS / OPERATOR

Kasir.

i. Brodi

Gambar 22. Deskripsi Inovasi Brodi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

B R O D I (B r o s u r D i g i t a l)



Brosur digital yang didesain secara unik dan menarik berisi informasi Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Simalungun termasuk mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, dan biaya (jika ada) atas layanan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengguna Inovasi :
Jaksa
Penyidik
Masyarakat umum
Advokat
Stakeholder lainnya

CARA KERJA

Masyarakat / *stakeholder* lainnya dapat mengakses BRODI melalui website Pengadilan Negeri Simalungun pada alamat <https://www.pn-simalungun.go.id>.

Masuk ke menu Layanan Publik, kemudian pilih menu E-Brosur (BRODI).

Gunakan aplikasi pemindai *QR code* pada ponsel pintar untuk memindai *QR code* pada halaman BRODI.

Pilih / klik jenis layanan yang ingin dilihat, informasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk brosur digital pada perangkat elektronik yang digunakan.

PETUGAS / OPERATOR

Aplikasi dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan operator.

j. Pangsid

Gambar 23. Deskripsi Inovasi Pangsid

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

PANGSSID (Panggilan Suara Sidang)



Aplikasi panggilan suara (*announcer*) yang digunakan untuk mempermudah melakukan panggilan kepada para pihak yang akan bersidang di Pengadilan Negeri Simalungun, terutama untuk perkara perdata.

Pengguna Inovasi :
Para pihak yang akan bersidang.

CARA KERJA

PANGSSID merupakan aplikasi untuk menyalurkan panggilan sidang yang dapat diakses oleh petugas jaga sidang melalui alamat <https://192.168.1.106/pangsid>.

PANGSSID dapat digunakan untuk memanggil para pihak yang akan mengikuti persidangan, mengumumkan panggilan untuk rapat bulanan, apel, maupun panggilan kustom lainnya.

Untuk menyalurkan panggilan sidang, petugas jaga sidang dapat memilih nomor perkara sesuai dengan antrian sidang, kemudian memilih para pihak yang akan dipanggil (Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, atau para pihak yang berperkara).

Untuk panggilan kustom lainnya, petugas jaga sidang dapat mengetikkan kalimat yang akan diumumkan melalui menu "Kustom Panggil". Kalimat tersebut kemudian akan diucapkan secara otomatis oleh *announcer* pada aplikasi PANGSSID.

Adapun untuk menu Panggilan Sidang, PANGSSID telah terintegrasi dengan data dari SIPP Pengadilan Negeri Simalungun.

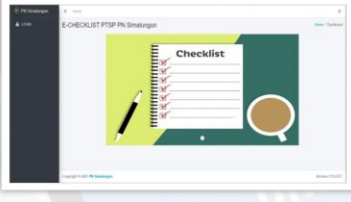
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

f. E- Checklist

Gambar 24. Deskripsi Inovasi E-Checklist

E - CHECKLIST (Electronic Checklist)



Aplikasi yang memudahkan petugas PTSP dalam memeriksa kelengkapan berkas - berkas yang diajukan oleh pengguna layanan.

Pengguna Inovasi :

- Panitera
- Panmud Perdata
- Petugas PTSP Meja Perdata
- Staf Perdata

CARA KERJA

Petugas PTSP bagian Perdata dapat mengakses e-Checklist melalui alamat <https://192.168.1.106/e-checklist>. E-Checklist akan menampilkan checklist yang berisi daftar persyaratan yang harus dilengkapi oleh pengguna layanan PTSP bagian Perdata sesuai dengan SPP yang berlaku di Pengadilan Negeri Simalungun.

Apabila persyaratan yang diminta telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, petugas akan memberikan tanda check pada poin yang sesuai di tampilan E-Checklist.

Petugas dapat mengetahui lengkap atau tidaknya persyaratan atas suatu layanan yang diminta dengan melihat poin - poin pada checklist tersebut.

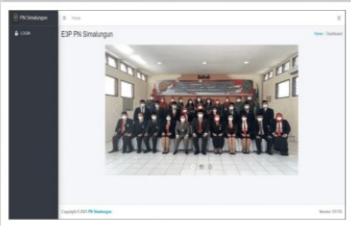
PETUGAS / OPERATOR

Petugas PTSP Bagian Perdata.

g. E3P

Gambar 25. Deskripsi Inovasi E3P

E3P (Elektronik Persiapan Penyelenggaraan Persidangan)



Aplikasi berbasis data SIPP yang berguna untuk memberitahukan status kehadiran para pihak pencari keadilan di Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim dan Panitera secara *real-time*, khususnya untuk perkara Perdata.

Pengguna Inovasi :

- Hakim
- Panitera Pengganti
- Petugas Sidang

CARA KERJA

Petugas jaga sidang dapat mengakses E3P melalui alamat <https://192.168.1.106/E3P>. Petugas dapat *login* dengan menggunakan user petugas.

Petugas kemudian memilih menu "Lapor Kesiapan Sidang", kemudian memilih menu "Lapor Persidangan".

Petugas memilih nomor perkara para pihak yang telah hadir dan siap untuk mengikuti sidang, kemudian mengisi menu "Kehadiran" dengan nama para pihak yang telah hadir beserta keterangan keahadirannya. Simpan, kemudian tekan tombol "Kirim".

E3P akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa persidangan dapat segera dimulai melalui aplikasi *Telegram* kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara tersebut.

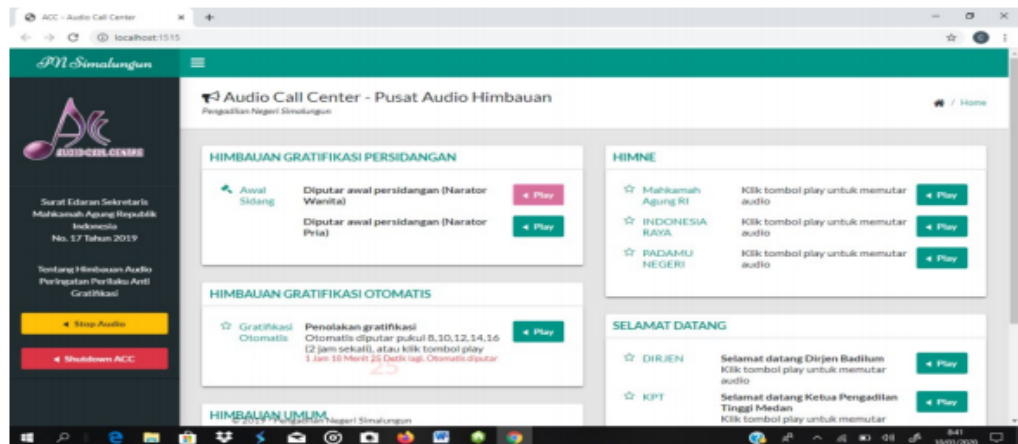
PETUGAS / OPERATOR

Petugas Jaga Sidang.

h. Audio Gratifikasi

Sesuai SE SEKMA RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, Pengadilan Negeri Simalungun telah memiliki aplikasi yang memudahkan implementasi SEMA tersebut setiap dua jam sekali.

Gambar 26. Deskripsi Inovasi Audio Gratifikasi



- i. Meja *e-Court* PN Simalungun digawangi oleh seorang Duta *e-Court* berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/KPN/SK.HK2.4/XII/2023 yang memiliki pengetahuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* untuk membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akun maupun untuk mendaftarkan perkaranya. Duta *e-Court* juga akan dengan senang hati membantu para pihak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai keuntungan berperkara melalui *e-Court*.

Gambar 27. Duta E-Court Pengadilan Negeri Simalungun



BAB VI

PENGAWASAN



A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Simalungun yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 92/KPN/SK.PW.1.1/XII/2024 tertanggal 25 November 2024.

Tabel 42. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Nama Hakim	Jabatan/ Gol Ruang
1	Hakim Pengawas Bidang Pidana dan WASMAT	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	Pembina / IV/a

2	Hakim Pengawas Bidang Perdata	Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.	Pembina / IV/a
3	Hakim Pengawas Bidang Hukum dan PTSP	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Penata Tk I/ III/d
4	Hakim Pengawas Bidang PTIP	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Penata Tk I/ III/d
5	Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.	Penata Tk I/ III/d
6	Hakim Pengawas Bidang Keportala	Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.	Penata Tk I/ III/d

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan
4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. PENGAWASAN EVALUASI

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2024 :

*Tabel 45. Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Negeri Simalungun
Tahun 2024*

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	4
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	3
5	Jumlah Pengaduan Yang telah Selesai Ditangani. LHP Telah Disampaikan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	1
6	Jumlah Pengaduan Yang telah Selesai Ditangani. LHP Telah Disampaikan Kepada Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan permohonan banding, kasasi, dan PK
 - b. Keuangan perkara;
 - c. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - b. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :



- a. Pengelolaan manajemen;
- b. Mekanisme pengawasan;
- c. Kepemimpinan;
- d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
- e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

The background of the slide is a photograph of a weathered wooden door. A heavy metal chain is wrapped around the handle area, and a small, light-colored rectangular lock is attached to the chain. The wood grain is clearly visible, and the overall tone is warm and rustic.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Simalungun telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun masih belum memadai secara kuantitas tapi dengan berbagai pembinaan internal dan pola mutasi internal yang dilakukan dengan pendekatan *the right person at the right place*, Pengadilan Negeri Simalungun mampu memberikan performa terbaiknya;
3. Pengelolaan anggaran sudah dilakukan dengan baik yang tercermin dari tercapainya realisasi anggaran di atas 99% baik pada DIPA 01 maupun DIPA 03;
4. Dukungan teknologi informasi memiliki peran yang sangat vital bagi terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun serta untuk menyukseskan program Mahkamah Agung dalam proses administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik melalui implementasi *e-Court* dan SIPP;
5. *E-Court* dan SIPP sudah terimplementasi dan secara konsisten dipergunakan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
6. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Simalungun telah dilakukan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum;

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2023 in4, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki beberapa rekomendasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Simalungun yaitu:

1. Perlu diadakan penambahan tenaga teknis terutama Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat peradilan;
3. Diharapkan usulan anggaran yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan kebutuhan *riil* dan skala prioritas dapat dikabulkan. Sehingga kebutuhan akan perangkat pengolah data dapat dipenuhi demi menunjang keberhasilan administrasi perkara di pengadilan berbasis elektronik;
4. Pemenuhan fasilitas pendukung *e-Litigasi* sudah sangat mendesak untuk dilakukan agar tidak terjadi kendala yang dapat mengganggu kelancaran persidangan secara elektronik;
5. Agar terus diadakan pengembangan terhadap aplikasi yang sudah ada, baik itu pendukung administrasi perkara secara elektronik, maupun aplikasi pendukung tugas kepaniteraan dan kesekretariatan lainnya, sehingga data yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang semakin akurat dan akuntabel.

